

BAB IV

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan politik *Asimilasi* dalam mengintegrasikan keberadaan etnis Cina dinegaranya. *Asimilasi*, di Indonesia, secara konseptual merupakan peleburan identitas etnis individu dalam arti etnis yang dimiliki tidak dapat diaktualisasikan di muka umum karena individu tersebut harus mengikuti budaya nasional yang ada. Di Indonesia, pada jaman Orde Baru secara operasional *Asimilasi* diterapkan sebagai berikut ini:

1. Perubahan identitas orang Cina menjadi Indonesia, yaitu dalam hal nama. Etnis Cina dihimbau untuk mengubah nama aslinya (nama Cina) menjadi nama Indonesia.
2. Perubahan identitas orang Cina menjadi Indonesia, yaitu dalam hal agama karena pemerintah Indonesia hanya mengakui lima agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha.
3. Dilarang melaksanakan kegiatan ibadah agama mereka, yaitu Konghucu sehingga etnis Cina umumnya akan beribadah di wihara karena kelenteng tidak diperbolehkan untuk ibadah.
4. Orang Cina tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Cina dalam kegiatan formal dan keseharian.

Akan tetapi, pada Era Reformasi, setelah Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan Keppres. No.6/2000, yaitu tentang pencabutan Inpres. No14/1967. Kemudian dikuatkan dengan Keppres. No.19/2002, yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati, etnis Cina di Indonesia dapat mengaktualisasikan identitas dan kebudayaannya secara umum. Hal tersebut menjadi titik tolak etnis Cina di Indonesia, dalam mengintegrasikan dirinya menjadi warga negara Indonesia dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia seutuhnya.

Disimpulkan juga, Pemerintah Negara Federasi Malaysia menerapkan kebijakan politik *Unity in Diversity* dalam mengintegrasikan keberadaan etnis Cina dinegaranya. Definisi konseptual *unity in diversity* yaitu suatu pandangan bahwa setiap kelompok diwakili dalam suatu lembaga sesuai dengan proporsi pendukungnya. Dengan demikian, setiap etnis dapat mengutarakan ide dan mengembangkan kebudayaan etnisnya tanpa mendapat tekanan dari etnis lain. Etnis Cina, di Malaysia, tidak menanggalkan identitas dirinya dengan adanya penerapan *unity in diversity* itu. Budaya Cina dianggap oleh pemerintah Malaysia sebagai budaya yang memperkaya kebudayaan Malaysia. *Unity in diversity* yang dianut oleh Malaysia selanjutnya mempunyai beberapa ciri yang khas, yaitu:

1. Adanya pengelompokan masyarakat dalam setiap kubu yang sangat kedap, tertutup rapat, dan sulit ditembus dari luar.
2. Adanya komunikasi secara vertikal yang menghubungkan massa dan elitnya (pemimpinnya) dalam setiap kelompok.
3. Adanya pelembagaan perundingan antarelite. Maksudnya perundingan antarelite dijadikan proses negosiasi yang melembaga.

Sementara itu, orang-orang Belanda menggunakan istilah *verzuiling* untuk menggambarkan situasi masyarakat yang terbagi dalam pilar-pilar yang menyangga kubah pada bangunan-bangunan kuno di Yunani. Pada kubah atau puncak bangunan sosial tersebut terjadi akomodasi dan kompromi antar elite dari setiap pilar.

Di Malaysia, secara operasional *Unity in Diversity* diterapkan sebagai berikut ini:

1. Orang Cina diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan identitas dirinya sebagai etnis Cina. Mereka dengan bebas mengaktualisasikan identitas dirinya sebagai etnis Cina. Mereka tidak perlu mengubah namanya menjadi nama melayu. Etnis Cina diakui di Malaysia sebagai etnis yang ikut membangun perekonomian Malaysia karena mayoritas etnis Cina pandai melakukan bisnis dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha.
2. Etnis Cina bebas beribadah sesuai dengan agamanya dan diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan budayanya. Mereka tidak dipaksakan oleh pemerintah Malaysia untuk menganut agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Malaysia. Agama Konghucu yang merupakan agama asli etnis Cina diakui di Malaysia dan mereka diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kebudayaan etnis Cina seperti barong sai, dan bela diri kung fu dapat berkembang di Malaysia karena pemerintah merasa hal itu sebagai kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan Malaysia.

Tabel berikut menunjukkan persamaan dan perbedaan kebijakan terhadap etnis Cina di Indonesia dan di Malaysia.

Tabel 4.1
Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Etnis Cina di Indonesia dan Malaysia

| Persamaan dan Perbedaan | Indonesia | Malaysia |
|-------------------------|---|---|
| Persamaan | <ul style="list-style-type: none"> • Etnis Cina di Indonesia dan Malaysia sama-sama aktif serta mendominasi dalam bidang ekonomi. • Adanya kedekatan pemerintah dengan pengusaha etnis Cina. • Etnis Cina di Indonesia sekarang, diperbolehkan mengaktualisasikan identitas serta kebudayaannya, seperti halnya etnis Cina di Malaysia. | |
| Perbedaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia yang kurang memberikan kesempatan pada etnis Cina di bidang politik dan pemerintahan. • Etnis Cina di Indonesia mendapat tekanan dari pemerintah, dengan dianjurkan untuk tetap mengganti nama menjadi nama Indonesia dan tidak boleh menggunakan bahasa Cina dalam keseharian maupun formal dengan alasan pembauran. • Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Asimilasi dalam mengintegrasikan etnis Cina dinegaranya. | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Malaysia memberikan kesempatan pada etnis Cina di bidang politik dan pemerintahan. • Etnis Cina di Malaysia diperbolehkan untuk menggunakan nama Cina dan diperbolehkan juga menggunakan bahasa Cina secara kegiatan formal serta kenegaraan. • Adanya konsep pembagian atau kuota yang sesuai dengan porsi dan proporsionalnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan antaretnis di Malaysia. • Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan Unity in Diversity dalam mengintegrasikan etnis Cina dinegaranya |